



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN



**IMPLEMENTASI SAKIP
PEMERINTAH KAB. BARITO SELATAN
TAHUN 2023**

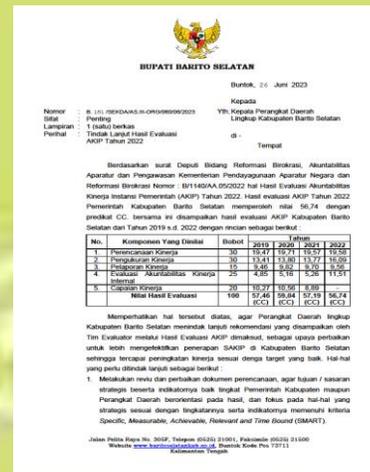
Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 menunjukkan nilai 56,74 dengan predikat CC. Berdasarkan surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Nomor : B/1140/AA.05/ 2022 tanggal 6 Desember 2022 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022



Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi LHE AKIP Tahun sebelumnya :

1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 134/SEKDA/AS.III-ORG/060/05/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal Desk Pemenuhan Dokumen Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2023 bersama Tim Evaluator Kementerian PANRB

2. Surat Pj. Bupati Barito Selatan Nomor : 181/SEKDA/AS.III-ORG/060/06/2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022



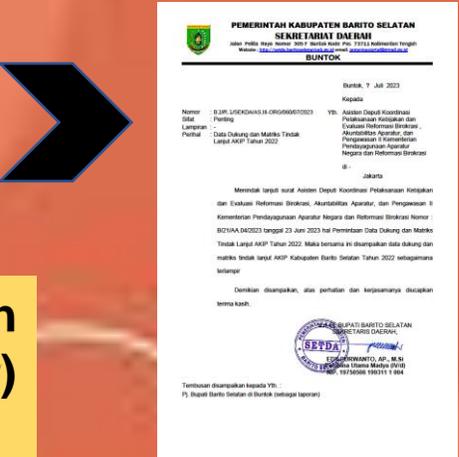
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 141/SEKDA/ AS.III-ORG/060/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 perihal Desk Pra Evaluasi SAKIP Tahun 2023



4. Mengikuti Asistensi Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Jakarta



5. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 197.1/SEKDA/AS.III-ORG/060/07/2023 tanggal 7 Juli 2023 perihal Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut AKIP Tahun 2022

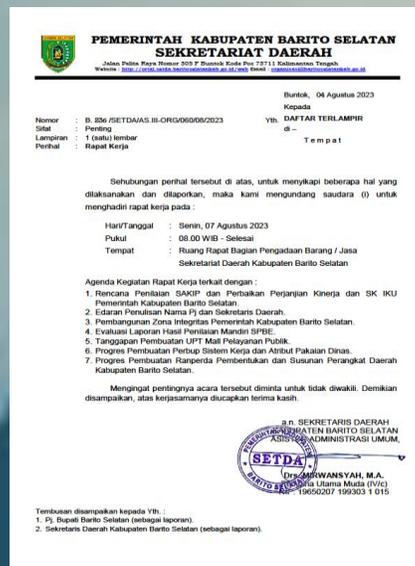


No	Rekomendasi	Rencana Aksi / Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progress Penyelesaian	Link
1.	Melakukan revisi dan perbaikan dokumen perencanaan, agar sesuai dengan strategi beserta indikatornya baik tingkat Pemerintah Kabupaten maupun Perangkat Daerah berdasarkan pada hasil dan hasil pada tahun yang terdahulu sesuai dengan indikator yang terdapat dalam Rencana Strategis, Maksudnya, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).	Mengurus Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 untuk mengisi kelengkapan arah kebijakan pembangunan daerah karena berubahnya masa jabatan Kepala Daerah dengan berakibatnya masa RPJMD 2023-2027.	Bepeta	Ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Selatan Tahun 2023-2026 (terlampir)	sekda@baritoselatan.go.id
2.	Menggunakan perencanaan dalam membangun dan mengelola pemerintahan SAKIP.	Melakukan rapat koordinasi dengan PD terkait hasil evaluasi terhadap pemerintahan SAKIP Kabupaten Barito Selatan.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Surat Bupati Nomor B.191/SEKDA/AS-OR/060/060/2023 tanggal 28 Juni 2023 perihal Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2022 (terlampir)	
3.	Membuat tindakan Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Mengurus Pedoman Teknis Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pengumpulan Data Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi) dan Bepeta Inspektoral Daerah	- Pedoman Pelaksanaan Petunjuk Baris - Pedoman Penyusunan Dokumen SAKIP - Pedoman Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah (terlampir)	
4.	Menyempatkan Pohon Kinerja yang akan dibangun, sehingga dapat digunakan dalam perencanaan pemerintahan.	Melakukan desk dengan PD dalam perbaikan Pohon Kinerja.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Pohon Kinerja Pemerintah Kabupaten dan PD telah dibuat (terlampir)	
5.	Mengurus dokumen indikator kinerja Kabupaten dan PD minimal menggunakan indikator/operasional indikator penanggung jawab indikator dan formulasi masing-masing indikator.	Melaksanakan rapat terkait penyusunan dokumen SAKIP.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Dokumen SKU Kabupaten dan PD. (terlampir)	
6.	Mempersiapkan proses pembangunan di SAKIP untuk dapat digunakan dalam perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi kinerja.	Mengumpul dokumen SAKIP Kabupaten dan PD untuk di up load ke aplikasi SAKIP.	Sekretaris Daerah (Bagian Organisasi)	Terunggah dokumen SAKIP ke aplikasi e-SAKIP Reviu (ESR) (terlampir)	

Semua Data Dukung dan Matrik Tindak Lanjut sudah disampaikan melalui e-SAKIP Reviu (esr) Kementerian PANRB

6. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
 Nomor : 236/SEKDA/ AS.III-ORG/060/08/2023
 tanggal 4 Agustus 2023 perihal Rapat Kerja

7. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
 Nomor : 181/SEKDA/AS.III-ORG/060/08/2023
 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Rapat Evaluasi
 Perjanjian Kinerja OPD



Perencanaan Kinerja Kab. Barito Selatan

RPJMD Periode
2017-2022
Sdh Berakhir



RPD
Periode
2023-2026



Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Hasil Asistensi
dg Tim Menpan RB



SK IKU
Kab. Barsel



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ /2023
TANGGAL : Agustus 2023
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BUPATI BARITO SELATAN.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PERJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial dan ekonomi kreatif serta mendorong masuknya investasi daerah.	1. Tingkat Indeksi. 2. PDDB atas dasar harga konstan.	Tingkat Indeksi diukur dengan IHK (Indeks Harga Konsumen). Penurunan Tingkat Indeksi Kab. Barito Selatan Menunjukkan Tingkat Indeksi Kota Palangka Raya, karena Palangka Raya merupakan kota IHK (Indeks Harga Konsumen) terdekat dengan Kabupaten Barito Selatan. Pada Kabupaten Barito Selatan merupakan kota IPI (Indeks Pergerakan Harga) dimana diambil dari aplikasi SPKIP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok) yang setiap hari diupdate perubahan harga 20 komoditi maksimal pukul 15.00 WIB pada hari Kerja melalui Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah. PDDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Tahun dasar tersebut umumnya ditetapkan selama periode 10 (sepuluh) tahunan. Penentuan PDDB atas dasar konstan, biasanya diperlukan untuk meniadakan pengaruh inflasi/dedasi akibat fluktuasi harga barang.	1. BPS 2. Tim Pengendalian Inflasi Daerah	1. SETDA 2. DISDAGKOP UKM 3. DKPPP
				BPS	1. DISDAGKOP UKM 2. DKPPP



Evaluasi Internal sudah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan dengan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor : 700/32/LHE/INSP/2023 tanggal 19 Juni 2023



LEMBAR HASIL EVALUASI (LHE)
Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (2022)

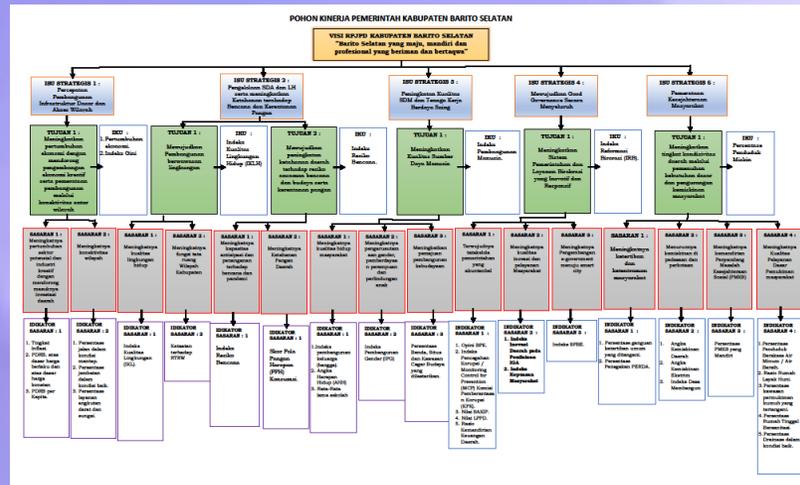
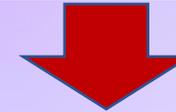
No	OPD	Prestasi Kerja (2022)					Predikat
		Pencapaian Kinerja (2022)	Progres Kinerja (2022)	Pelaksanaan Kinerja (2022)	Evaluasi Akut (100%) Kinerja Internal (2022)	Nilai Rata	
1	Setoran Akut	60,00	33,7	50,35	35,6	63,67	B
2	Divisi Kelembagaan	23,33	16,25	9,80	14,28	81,3	B
3	UPPERDAS	20,00	10,75	7,07	14,00	62,5	B
4	Salah satu bidang urusan pemerintahan di tingkat Daerah	23,33	16,45	9,41	14,55	61,91	B
5	Salah satu bidang urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten	30,75	17,61	10,00	14,55	61,23	B
6	Salah satu bidang urusan pemerintahan di tingkat Kecamatan	40,00	16,00	10,35	14,80	61,23	B
7	Sekelompok OPD	21,00	13,7	9,4	14,2	61,83	B
8	Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola	20,00	10,00	10,00	13,35	60,6	B
9	Divisi Kelembagaan dan Tata Kelola	20,00	10,00	9,91	14,15	60,4	B
10	Divisi Perencanaan	20,00	10,00	10,00	14,15	60,3	B
11	Divisi Perencanaan	20,00	10,00	10,00	14,15	60,3	B
12	Perencanaan	19,91	10,00	10,00	14,15	60,29	B
13	Salah satu bidang urusan pemerintahan di tingkat Kabupaten	19,91	10,00	9,99	14,00	60	B
14	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
15	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
16	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
17	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
18	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
19	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
20	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
21	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
22	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B
23	Divisi Perencanaan dan Tata Kelola	19,91	10,00	10,00	14,00	60,44	B



Logical Framework (Pohon Kinerja) Cascading, Crosscutting

**Pohon Kinerja
Sesuai dengan PK & SK IKU
Pj. Bupati Barito Selatan**

**Cascading dan Komponen Perencanaan
Sesuai dengan PK & SK IKU
Pj. Bupati Barito Selatan**



**Evaluasi Lapangan
Implementasi SAKIP Tahun
2023 dengan Tema
“Pengentasan Kemiskinan”**



**Unit Kerja Yang Terkait dengan
Pengentasan Kemiskinan sesuai dengan
logical framework/ Kerangka Kerja Logis
pengentasan kemiskinan yang dimiliki 13
Urusan dengan 13 OPD yang
menanganinya**



1. Urusan Perencanaan (BAPPEDA)
2. Urusan Kesehatan (Dinkes)
3. Urusan Pendidikan (Diknas)
4. Urusan Ketahanan Pangan (DKPPP)
5. Urusan Sosial (DinSosPMDes, BPBD)
6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DinSosPMDes)
7. Urusan Kependudukan Sipil (DisDukCatpil)
8. Urusan Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
9. Urusan Koperasi, UKM (DisDagKopUKM)
10. Urusan Pekerjaan Umum (Dinas PUPR)
11. Urusan Tenaga Kerja (Disnakertrans)
12. Urusan Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana (DPPKBP3A)
13. Urusan Perumahan & Kawasan Pemukiman (DISPERKIMTAN)



**Selanjutnya Materi tentang
Pengentasan Kemiskinan akan
Disampaikan oleh Kepala Bappeda**

Terima Kasih

